

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Menurut Firdaus “perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Tahun 2016 kebijakan baru perhutanan sosial yang lebih berkeadilan dan sederhana proses permohonannya diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (Firdaus, 2018).

Defenisi Perhutanan Sosial sendiri banyak ditafsirkan oleh berbagai pihak. Di Cina, perhutanan sosial diartikan sebagai bentuk dari sistem pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai komponen sosial (Awang, 2003). Pengertian sosial dalam hal ini adalah semua pihak yaitu pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, universitas/lembaga penelitian hingga masyarakat sendiri. Menurut Westoby (1968) di dalam Ismatul Hakim (2010), yang melihat secara umum bahwa kegiatan kehutanan yang menjamin kelancaran manfaat produksi dan kesenangan bagi masyarakat,

tanpa membedakan apakah itu lahan milik publik (negara) maupun lahan perorangan (*private land*).

Dalam tataran kebijakan pemerintah, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan dan menggelar program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak tahun 1995, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sejak tahun 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak 2008. Sebelum itu, Hutan Kemasyarakatan pertama kali dijadikan sebagai nama program di Departemen Kehutanan pada tahun 1986; sedangkan nama Perhutanan Sosial digunakan sebagai nama pendekatan dan program oleh Perum Perhutani mulai tahun 1986 (Kartasubrata, 1994; Suharjito dan Darusman 1998; Suharjito, 2000). Pada awal tahun 1990an di luar Jawa diselenggarakan proyek pengembangan Perhutanan Sosial (*Social Forestry*), yaitu SFDP di Sanggau Kalimantan Barat, proyek percontohan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Sementara di Jawa Perum Perhutani menggeser pendekatannya dari Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) ke Perhutanan Sosial, sedangkan di luar Jawa pada tahun 1991 Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan. Pada tahun 2003 Kementerian Kehutanan mencanangkan program *Social Forestry* sebagai “payung” dari program-program kelola sosial pembangunan kehutanan. Konsep *Social Forestry* ternyata berjalan ditempat (stagnant) dan kabur dengan konsep yang sudah ada, yakni HKm. Istilah-istilah tersebut mengandung pengertian dan ruang lingkup yang berbeda-beda, dan istilah

yang sama mengandung pengertian dan ruang lingkup yang berbeda antar waktu. Selain PS, HKm, HD, dan HTR, terdapat pokok bahasan lain yang menarik perhatian, yaitu masyarakat adat dan hutan adat (Suharjito, 2017).

Pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial setelah tahun 2016, bisa dikatakan jauh lebih baik daripada konsep perhutanan sosial tahun-tahun sebelumnya. Terutama karena lokasi pemberian izin perhutanan sosial tidak hanya di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tetapi juga di kawasan hutan konservasi. Perbaikan kebijakan dan pelaksanaan skema perhutanan sosial ini bukanlah jalan yang singkat akan tetapi hasil dari evaluasi dan perjuangan para pihak pendukung perhutanan sosial yang berkeadilan, sekaligus elaborasi pengalaman masyarakat pengelola perhutanan sosial selama bertahun-tahun menjadi dasar untuk perbaikan (Firdaus, 2018).

2.2 Pengelolaan Hutan

Menurut UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pertanahan nasional karena hutan merupakan bagian terbesar daratan di Indonesia, sementara pemerintah mengklaim bahwa sebagian terbesar hutan adalah merupakan hutan negara.

Keterbukaan akses masyarakat terhadap hutan di Indonesia kemudian mulai di rasakan sejak diberlakukannya SK Menhut No 677/KptsII/1999 tentang HKm. Pemberlakuan kebijakan tersebut sebagai usaha mengurangi

perambahan hutan oleh masyarakat dan permasalahan tenurial yang ada pada era reformasi. Kemudian tahun 2003 pemerintah Indonesia semakin memperluas skema Perhutanan Sosial dengan program Hutan Tanaman Rakyat (Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007) dan Hutan Desa (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut- II/2008). Selanjutnya kedua skema perhutanan sosial tersebut diatur secara bersama dengan HKm, Hutan Adat, dan Kemitraan dalam Kemen LHK No. P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (Wulandari, Budiono, & Nurrochmat, 2016).

Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pertanahan nasional karena hutan merupakan bagian terbesar daratan di Indonesia, sementara pemerintah mengklaim bahwa sebagian terbesar hutan adalah merupakan hutan negara. UUPA mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan administrasi tanah (Government of Indonesia 1960), sedangkan UU Kehutanan mengatur pengelolaan hutan (Government of Indonesia 1999). Peraturan perundang-undangan lainnya yang juga berkaitan dengan pengelolaan hutan adalah Peraturan Pemerintah No. 3/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan hutan, telah lebih memperjelas definisi dan klasifikasi hutan di Indonesia berdasarkan status dan fungsinya. Peraturan perundang-perundangan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mendefinisikan hutan berdasarkan struktur kelembagaannya (*institutional arrangement*) (Government of Indonesia 2008).

Dalam hal ini kelembagaan dapat diartikan sebagai ‘suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama’ (Djogo, Sunaryo, Suharjito, Sirait, 2003).

Menurut Zainudin, Hidayat, Lesmana, “pada prinsipnya terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, yaitu:

1. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena hutan sendiri menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka;
2. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada di dalam habitat mereka;
3. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki hukum adat untuk ditegakkan secara turun menurun;
4. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem yang ada di hutan;

5. Sebagian dari masyarakat yang tinggal di kawasan hutan sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar;
6. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional” (Zainudin, Hidayat, Lesmana, 2014).

2.3 Perencanaan Pengelolaan Hutan

Perencanaan Pengelolaan Hutan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan (pasal 1 angka 1 PP 44 Tahun 2004). Kegiatan perencanaan pengelolaan hutan merujuk pada Bab IV pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 1999, yang meliputi: 1.) inventarisasi hutan; 2.) pengukuhan kawasan hutan; 3.) penatagunaan kawasan hutan; 4.) pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan 5.) penyusunan rencana kehutanan. Output inventarisasi hutan adalah data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap. Output pengukuhan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan

secara definitif. Output penatagunaan kawasan hutan adalah penetapan fungsi (sebagai hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi) – dan penggunaan kawasan hutan. Output pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah terbentuknya wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi, kabupaten dan unit pengelolaan (KPH). Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, output rencana kehutanan meliputi rencana kehutanan penge lolaan hutan pada KPHK, KPHL dan KPHP. Sedangkan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan output rencana pengelolaam meliputi rencana pengelolaan jangka panjang, menengah dan pendek (Goverment of Indonesia, UU No. 41 tahun 1999).

Perencanaan hutan adalah upaya untuk mendayagunakan fungsi hutan dengan menciptakan kegiatan yang dapat mempengaruhi proses yang sedang berjalan, atau menciptakan proses baru, agar hutan memberikan sumbangan maksimal untuk ikut mempengaruhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanto dan Yuwono, 2005). Dari definisi ini terdapat tiga kata kunci yaitu fungsi hutan; mempengaruhi proses; dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti hutan merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar sehingga memberikan sumbangan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari

(pasal 1 angka 3 PP Nomor 6 Tahun 2007). Output dari tata hutan adalah blok dan petak serta pemetaanya berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan serta intensitas dan efisiensi pengelolaan. Posisi vertikal perencanaan hutan menghendaki adanya hubungan yang konsisten dari tingkat nasional, wilayah, sampai tingkat operasional. Hal ini berkaitan dengan fungsi hutan sebagai penjaga lingkungan maupun maupun penghasil banyak komoditas yang diperlukan masyarakat luas. Kebijakan makro harus dapat mengakomodasikan setiap kepentingan lokal, sebaliknya kegiatan operasional harus dalam konteks kepentingan masyarakat luas serta untuk jangka waktu yang panjang (Simon, 2001).

Pelaksanaan program kehutanan di daerah tidak boleh terpisah dengan program dan rencana yang disusun dan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan didukung dengan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga diperoleh sinkronisasi antara pusat dan daerah. Pembagian peran dan tanggung jawab tersebut akan berjalan jika ada tata hubungan kerja yang jelas antara masing-masing pihak.

2.4 Kelompok Tani Hutan

Implikasi pendekatan kehutanan masyarakat adalah bahwa masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sebagai pelaku utama, masyarakat harus mampu mengendalikan pembuatan keputusan tentang pengelolaan sumberdaya hutan. Dalam UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tercantum

bahwa pelaku utama dalam kegiatan kehutanan yaitu masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Penguatan modal manusia dalam bidang kehutanan diperlukan agar partisipasi dan kerjasama yang dibangun bersifat setara atau tidak ada dominasi satu pihak kepada pihak lain. Kesetaraan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pembangunan kehutanan dengan pihak lain menjadi sangat penting agar mereka berperan secara optimal dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Sardjono, 2004). Mulyadi juga menyatakan bahwa aspek yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan adalah faktor manusia diantaranya adalah kelembagaan organisasi kelompok tani (Mulyadi, 2008).

Masyarakat desa hutan merupakan sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan yang terikat dengan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam maupun sekitar kawasan hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya dalam konteks, ekonomi, sosial, budaya dan politik dengan melakukan interaksi terhadap hutan (Awang, 2008).

Darusman dan Hardjanto (2006) menyatakan bahwa pengusahaan hutan rakyat masih merupakan jenis usaha sampingan yang dilakukan oleh keluarga petani kecil secara subsisten. Pendapatan dari hutan rakyat masih diposisikan sebagai pendapatan sampingan dan insidental dengan kisaran tidak lebih dari

10% dari pendapatan total. Namun demikian, manfaat ekonomi hutan rakyat secara langsung dapat dirasakan nyata dan secara tidak langsung berpengaruh pada perekonomian desa. Zein (1998) menyatakan, setidaknya ada 2 (dua) aspek penting dalam pengusahaan hutan rakyat, yaitu sosial ekonomi dan kelestarian. Aspek sosial ekonomi mengindikasikan bahwa produk hutan rakyat merupakan andalan pemenuhan konsumsi kayu lokal dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Aspek kelestarian hutan rakyat terkait dengan fungsi hutan rakyat untuk perlindungan tata air dan pengawetan tanah.

Menurut Corryanti (2015) program pengelolaan hutan bersama masyarakat tentunya masih belum menjadi solusi dalam permasalahan konflik tenurial yang ada di sekitar kawasan hutan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keserasian antara pandangan perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Masih banyak sekali permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai PHBM terutama kebutuhan masyarakat yang masih belum terpenuhi. Selain itu, adanya ketidakcocokan masyarakat terhadap program tersebut karena sistem yang dipakai. Menurut Ismawan (2001) kelompok tani adalah perkumpulan orang-orang (petani) yang tinggal di sekitar hutan dan menyatukan diri dalam usaha di bidang sosial-ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan ikut serta melestarikan hutan dengan prinsip kerja dari, oleh, dan untuk anggota. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 1 yang dimaksud dengan Kelompok Tani Hutan sebagai kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola

usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. KTH memiliki fungsi sebagai media: pembelajaran masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemecahan permasalahan, kerja sama dan gotong royong, pengembangan usaha produktif, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan; dan peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Maksud pembinaan KTH adalah untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan dan usaha, dengan tujuan untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan. Bidang kegiatan KTH berkaitan dengan pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam yang meliputi kegiatan antara lain Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Rakyat (HR), Pembibitan tanaman kehutanan, Penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan, Agroforestry/silvopasture/silvofishery, Pemanfaatan jasa lingkungan Pemanfaatan kawasan hutan, Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, Pemungutan hasil hutan bukan kayu, Pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai (Ismawan, 2001).

Kelompok Tani Hutan (KTH) bagian dari kelembagaan hutan yang diharapkan mampu mengkomodasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan seperti penanaman, pemeliharaan, pemanenan, penanganan pasca panen, pengembangan usaha serta penyuluhan terhadap petani hutan. Dengan demikian diharapkan hutan rakyat tersebut seakan-akan sebagai salah satu unit usaha yang mapan. Kelompok tani yang dinamis biasanya ditandai oleh

adanya kegiatankegiatan atau interaksi, baik di dalam kelompok maupun dengan pihak-pihak luar kelompok tersebut sebagai upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan pendekatan psikososial, tingkat kedinamisan KTH tersebut dapat dilihat dari unsur-unsurnya (Elva, 2017).

Menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) Kelompok Tani Hutan (KTH) Bangkit Sejahtera terletak di Desa Gajahrejo, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Lindung (HL) yang memiliki luas 3.120 ha dan jumlah penggarap lahan sebanyak 2.200 orang (Sekretariat Jenderal KLHK, 2018).

Penelitian yang berkaitan dengan dinamika KTH telah dilakukan oleh Yunasaf (1997), Sudaryanti (2002) dan Diniyati (2003). Ketiga penelitian tersebut mencoba melihat hubungan unsur dinamika kelompok dengan keberhasilan usaha tani. Menurut Purwanto (2011) Secara garis besar latar belakang atau dasar berdirinya kelompok tani dapat dikelompokkan dalam dua golongan. Pertama, kelompok yang berdiri karena ada dorongan dari luar, baik karena ada program bantuan atau proyek. Kedua, kelompok tani yang terbentuk karena dorongan dari dalam, yaitu masyarakat atau petani itu sendiri. Usia atau lama berdirinya kelompok tidak menjamin tercapainya peningkatan kelas kelompok. Sebaliknya, kelompok yang didirikan dari bawah atau inisiatif masyarakat sendiri dapat menjadi modal dasar bagi berkembangnya kelompok secara lebih baik.